E-ISSN : 3025-1311
https://journal.cib.institute/index.php/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 11 No 6 Tahun 2026

ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* (TAM)

Fatimah Tri Zahara[1], M. Syendi Apriko [2]
[1,2]Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
[1]Fatimahzaharaa497@gmail.com, [2]syendi_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The Regional Government Information System (SIPD) is an integrated system developed by the Ministry of Home Affairs to support regional government processes, including financial administration. The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of South Sumatra Province uses SIPD in its Finance Division, so user acceptance of the system is an important aspect to evaluate. This study aims to describe the implementation of SIPD in supporting financial administration and to analyze user acceptance using the Technology Acceptance Model (TAM), focusing on Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU). The study used a descriptive quantitative approach. Data were collected through observation during a work practice from 1 July to 10 August 2026 and through a questionnaire of ten statements on a five-point Likert scale answered by 31 respondents. The results show a mean PU score of 4.17 and a mean PEOU score of 4.29, indicating that respondents tended to perceive SIPD as useful and easy to use. Two additional statements, on internet connection constraints and the need for accuracy in data entry, each obtained a mean of 4.29. The Corrected Item-Total Correlation values ranged from 0.55 to 0.80, above the r-table value of 0.355, and Cronbach's Alpha was 0.91. The findings are descriptive and reflect respondents' perceptions only; they do not test causal relationships among TAM constructs.

***Keywords**: SIPD, Technology Acceptance Model, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Financial Administration*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagiarism Checker No.: 237.u873247.fh8374

Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses pemerintahan daerah, termasuk administrasi keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan SIPD pada Bidang Keuangan sehingga penerimaan pengguna terhadap sistem tersebut penting untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan SIPD dalam mendukung penatausahaan keuangan dan menganalisis penerimaan pengguna menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan fokus pada persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*/PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*/PEOU). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi selama Kerja Praktik pada 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 dan kuesioner berisi sepuluh pernyataan berskala Likert lima tingkat yang dijawab oleh 31 responden. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata PU sebesar 4,17 dan rata-rata PEOU sebesar 4,29, yang berarti responden cenderung menilai SIPD bermanfaat dan mudah digunakan. Dua pernyataan tambahan mengenai kendala koneksi internet dan kebutuhan ketelitian input data masing-masing memperoleh rata-rata 4,29. *Nilai Corrected Item-Total Correlation* berkisar antara 0,55 dan 0,80, di atas nilai r tabel 0,355, dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,91. Temuan ini bersifat deskriptif dan menggambarkan persepsi responden, sehingga tidak menguji hubungan sebab-akibat antar konstruk TAM.

Kata Kunci: SIPD, *Technology Acceptance Model*, Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Penatausahaan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi pemerintahan. Di tingkat pemerintah daerah, strategi tersebut diwujudkan antara lain melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 (Kementerian Dalam Negeri, 2019). SIPD merupakan sistem terintegrasi yang mendukung proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan.

Pada penatausahaan keuangan daerah, SIPD menyediakan berbagai pengaturan dan proses administrasi, seperti penjadwalan, pengelolaan pengguna, konfigurasi rekening, penentuan besaran Uang Persediaan (UP), serta kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD). Pengelolaan keuangan daerah sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Pemerintah Republik

Indonesia, 2019; Kementerian Dalam Negeri, 2020). Agar proses administrasi berjalan akurat, pengguna perlu memahami fungsi menu dan tahapan operasional sistem.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan SIPD untuk mendukung administrasi dan pengelolaan keuangan pada Bidang Keuangan. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan Kerja Praktik, penggunaan SIPD menuntut pemahaman mengenai menu, fitur, dan alur kerja sistem, kemampuan beradaptasi terhadap pembaruan sistem, serta ketelitian dalam memasukkan data. Keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fitur, tetapi juga oleh sejauh mana sistem diterima dan dimanfaatkan oleh penggunanya.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua persepsi utama, yaitu persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) (Davis, 1989). Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut, antara lain oleh Venkatesh dan Davis (2000), dan banyak digunakan untuk mengevaluasi penerimaan sistem informasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penerapan SIPD dalam mendukung proses penatausahaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, dan (2) menganalisis penerimaan pengguna terhadap SIPD menggunakan TAM dengan fokus pada persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada penerapan SIPD di Bidang Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, dengan pembahasan yang difokuskan pada proses penatausahaan keuangan yang meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), SPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada Bidang Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 23, Kota Palembang, selama kegiatan Kerja Praktik pada tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, observasi terhadap proses penatausahaan keuangan yang menggunakan SIPD, termasuk tampilan, menu, fitur, dan alur penggunaannya. Kedua, pengumpulan informasi melalui penjelasan pembimbing lapangan dan pegawai mengenai penerapan serta kendala penggunaan SIPD. Ketiga, penyebaran kuesioner menggunakan *Google Form* kepada 31 responden pengguna SIPD. Setiap pernyataan pada kuesioner dijawab menggunakan skala Likert lima tingkat, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju) (Likert, 1932). Peraturan dan panduan resmi SIPD digunakan sebagai bahan pendukung.

2.3 Instrumen Penelitian

Instrumen terdiri atas sepuluh pernyataan. Lima pernyataan (X1.1 sampai X1.5) mengukur persepsi kemanfaatan, yaitu kemudahan penyusunan dokumen, kesesuaian fitur dengan kebutuhan, percepatan proses administrasi, pengurangan kesalahan pencatatan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Tiga pernyataan (X2.1 sampai X2.3) mengukur persepsi kemudahan penggunaan, yaitu kemudahan memahami alur penggunaan, kejelasan proses input data, dan sistematika tahapan penggunaan. Dua pernyataan terakhir (K1 dan K2) menanyakan kendala koneksi internet dan kebutuhan ketelitian ekstra saat memasukkan data. Kedua pernyataan terakhir bukan bagian dari konstruk TAM sehingga dibahas terpisah dan tidak digabungkan ke dalam skor PU maupun PEOU.

2.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, dan rata-rata skor pada setiap pernyataan. Pengolahan dilakukan menggunakan aplikasi PSPP. Uji validitas dilakukan dengan melihat *Nilai Corrected Item-Total Correlation*, yaitu korelasi setiap item dengan skor total tanpa item tersebut, yang dibandingkan dengan nilai r tabel. Untuk jumlah responden 31 orang (derajat bebas 29) pada taraf signifikansi 5% (dua arah), nilai r tabel sebesar 0,355. Item dinyatakan valid apabila nilainya lebih besar daripada r tabel.

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* (Cronbach, 1951) dengan rumus pada Persamaan (1). Nilai alpha yang semakin tinggi menunjukkan konsistensi internal instrumen yang semakin baik.

$$a = [k \,/\, (k - 1)] \times [1 - (\Sigma\, V_i \,/\, V_t)] \qquad (1)$$

dengan k adalah jumlah item, V_i adalah varians skor item ke-i, dan V_t adalah varians skor total.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan SIPD pada Bidang Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

SIPD digunakan untuk mendukung proses administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Pada Bidang Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, SIPD membantu pengguna mengelola tahapan dan dokumen keuangan dalam alur kerja yang terstruktur, dan pengguna mengakses sistem sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Proses penatausahaan keuangan diawali dengan pengaksesan menu Informasi Keuangan Daerah, kemudian pengguna memilih Penatausahaan Keuangan Daerah dan masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah diberikan. Setelah masuk, pengguna menjalankan proses melalui menu Pengaturan Awal yang terdiri atas Jadwal Penatausahaan, Kelola User, Rekening RKUD, Besaran UP, dan Kebijakan SPD. Menu Jadwal Penatausahaan (Jadwal Akun BUD) digunakan untuk mengatur jadwal penatausahaan, sedangkan menu Kelola User digunakan untuk mengatur pengguna sesuai kebutuhan dan hak aksesnya. Alur pekerjaan yang diamati selama Kerja Praktik mencakup penyusunan DPA, SPD, SPP, SPM, hingga SP2D.

Penerapan sistem informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fitur, tetapi juga dengan kemampuan pengguna memahami dan memanfaatkan fitur tersebut dalam pekerjaan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menggunakan pendekatan TAM dengan aspek persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan.

3.2 Karakteristik Responden

Analisis dilakukan terhadap 31 jawaban kuesioner. Karakteristik responden berdasarkan jabatan dan lama penggunaan SIPD disajikan pada Tabel 1. Informasi ini memberikan konteks terhadap tanggapan responden, tetapi tidak digunakan untuk membandingkan persepsi antarkelompok karena analisis perbandingan kelompok tidak dilakukan.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jabatan	Pengguna Anggaran (PA)	10	32,3%
	Operator/Admin SIPD	8	25,8%
	Bendahara Umum Daerah (BUD)	7	22,6%
	Staf Bidang Keuangan	5	16,1%

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
	Lainnya	1	3,2%
Lama menggunakan SIPD	2 tahun	13	41,9%
	1 tahun	11	35,5%
	3-5 tahun	7	22,6%

Responden terbanyak adalah Pengguna Anggaran (PA) sebanyak 10 orang (32,3%), diikuti Operator/Admin SIPD sebanyak 8 orang (25,8%). Berdasarkan lama penggunaan, sebagian besar responden telah menggunakan SIPD selama 2 tahun (41,9%) dan 1 tahun (35,5%), sedangkan 22,6% responden telah menggunakannya selama 3-5 tahun.

3.3 Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*)

Aspek *Perceived Usefulness* (PU) diukur melalui lima pernyataan yang hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Skor Persepsi Kemanfaatan (PU)

Kode	Pernyataan	Rata-rata
X1.1	SIPD memudahkan proses penyusunan DPA, SPD, SPP, SPM, dan SP2D	4,13
X1.2	Fitur SIPD sudah sesuai dengan kebutuhan penatausahaan keuangan di bidang saya	4,16
X1.3	SIPD mempercepat proses administrasi keuangan	4,06
X1.4	SIPD membantu meminimalkan kesalahan pencatatan	4,23
X1.5	SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	4,26
	Rata-rata keseluruhan PU	**4,17**

Rata-rata keseluruhan PU sebesar 4,17 dari skala 5 menunjukkan bahwa responden cenderung menilai SIPD bermanfaat untuk mendukung pekerjaan penatausahaan keuangan. Penilaian tertinggi diberikan pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (4,26), sedangkan percepatan proses administrasi memperoleh rata-rata terendah (4,06). Dengan demikian, penilaian manfaat tidak sepenuhnya seragam pada seluruh indikator. Rata-rata tersebut merupakan ringkasan persepsi responden dan tidak dengan sendirinya membuktikan besarnya penghematan waktu atau penurunan kesalahan secara objektif.

3.4 Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*)

Aspek *Perceived Ease of Use* (PEOU) diukur melalui tiga pernyataan tentang kemudahan memahami alur, proses input data, dan sistematika tahapan penggunaan. Hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Skor Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU)

Kode	Pernyataan	Rata-rata
X2.1	Alur penggunaan SIPD mudah dipahami dan diikuti	4,26
X2.2	Proses input data pada SIPD tidak membingungkan	4,29
X2.3	Tahapan penggunaan SIPD (dari input hingga penerbitan dokumen) berjalan secara sistematis	4,32
	Rata-rata keseluruhan PEOU	**4,29**

Rata-rata keseluruhan PEOU sebesar 4,29 dari skala 5 menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap kemudahan penggunaan SIPD. Indikator dengan rata-rata tertinggi adalah tahapan penggunaan yang berjalan secara sistematis (4,32), sedangkan alur penggunaan yang mudah dipahami memperoleh rata-rata 4,26. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dinilai baik, namun panduan operasional dan pemahaman terhadap menu tetap penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pekerjaan.

3.5 Kendala Penggunaan SIPD

Dua pernyataan lain membahas kendala koneksi internet dan kebutuhan ketelitian ekstra saat memasukkan data. Kedua pernyataan ini dibahas terpisah dari PU dan PEOU. Hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata Skor Pernyataan Kendala Penggunaan SIPD

Kode	Aspek yang ditanyakan	Rata-rata	Responden dengan skor 4 dan 5
K1	Kendala koneksi internet	4,29	28 dari 31 responden
K2	Kebutuhan ketelitian ekstra saat memasukkan data	4,29	28 dari 31 responden

Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi internet dan ketelitian input dirasakan penting oleh sebagian besar responden. Gangguan jaringan berpotensi menghambat akses sistem dan penyelesaian pekerjaan, sedangkan ketelitian diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian data. Selain itu, pemahaman pengguna terhadap alur dan fungsi menu SIPD perlu mendapat perhatian agar setiap tahapan pekerjaan dapat dilakukan sesuai prosedur. Hasil ini menggambarkan persepsi responden dan tidak berarti bahwa seluruh kendala selalu dialami oleh setiap pengguna.

3.6 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap 10 item menggunakan *Nilai Corrected Item-Total Correlation*. Hasilnya disajikan pada Tabel 5. Seluruh item memiliki nilai antara 0,55 dan 0,80, yang berada di atas nilai r tabel sebesar 0,355 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nilai terendah dimiliki item X2.2 (0,55) dan nilai tertinggi dimiliki item X2.1 (0,80).

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Item	Aspek	Corrected Item-*Total Correlation*	Keterangan
X1.1	PU	0,69	Valid
X1.2	PU	0,72	Valid
X1.3	PU	0,65	Valid

Item	Aspek	Corrected Item-*Total Correlation*	Keterangan
X1.4	PU	0,61	Valid
X1.5	PU	0,67	Valid
X2.1	PEOU	0,80	Valid
X2.2	PEOU	0,55	Valid
X2.3	PEOU	0,75	Valid
K1	Kendala	0,68	Valid
K2	Kendala	0,78	Valid

3.7 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas terhadap 10 item disajikan pada Tabel 6. Nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,91 dengan 31 responden valid dan tidak ada data yang dikecualikan. Nilai tersebut menunjukkan konsistensi internal yang tinggi pada kumpulan item yang diuji.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Jumlah responden valid	Jumlah item	Cronbach's Alpha	Interpretasi
31	10	0,91	Konsistensi internal tinggi

Meskipun demikian, dua item terakhir membahas kendala penggunaan, bukan persepsi kemanfaatan atau kemudahan secara langsung. Oleh karena itu, nilai alpha tersebut hanya menggambarkan kumpulan 10 item sebagaimana diuji. Apabila instrumen digunakan untuk menghitung skor konstruk TAM, pengelompokan item perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan definisi operasional masing-masing konstruk.

3.8 Pembahasan

Hasil kuesioner memperlihatkan rata-rata persepsi kemanfaatan sebesar 4,17 dan persepsi kemudahan penggunaan sebesar 4,29 dari skala 5. Menurut kerangka TAM, kedua persepsi tersebut merupakan penentu utama penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi (Davis, 1989). Dengan demikian, secara deskriptif responden menilai SIPD bermanfaat untuk mendukung pekerjaan penatausahaan keuangan dan relatif mudah dipahami serta digunakan, yang menunjukkan kecenderungan penerimaan yang baik. Persepsi kemudahan penggunaan sedikit lebih tinggi daripada persepsi kemanfaatan, dan percepatan proses administrasi menjadi indikator dengan penilaian terendah.

Di sisi lain, pernyataan mengenai kendala koneksi internet dan kebutuhan ketelitian masing-masing memperoleh rata-rata 4,29. Nilai ini menegaskan bahwa penilaian positif terhadap manfaat dan kemudahan tidak menghilangkan kebutuhan untuk menangani hambatan teknis dan menjaga akurasi input. Perbaikan yang dapat dipertimbangkan meliputi menjaga kestabilan koneksi dan melaporkan gangguan kepada petugas terkait, memeriksa ulang data dan dokumen sebelum proses dilanjutkan, serta menyediakan panduan alur dan menu bagi pengguna, disertai pertukaran pengetahuan antarpengguna.

Pembahasan ini bersifat deskriptif dan berlandaskan jawaban kuesioner dari 31 responden. Penelitian ini belum menguji hubungan sebab-akibat antarkonstruk TAM, belum mengukur sikap, niat, maupun penggunaan aktual sistem, belum membandingkan persepsi menurut jabatan atau lama penggunaan, dan belum membuktikan dampak SIPD terhadap waktu penyelesaian pekerjaan melalui data operasional. Oleh karena itu, kesimpulan dibatasi pada persepsi responden.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, SIPD telah diterapkan pada Bidang Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung proses penatausahaan keuangan melalui berbagai menu dan fitur sesuai hak akses pengguna, seperti Jadwal Penatausahaan, Kelola User, Rekening RKUD, Besaran UP, dan Kebijakan SPD. Analisis terhadap 31 responden menggunakan TAM menunjukkan rata-rata persepsi kemanfaatan sebesar 4,17 dan rata-rata persepsi kemudahan penggunaan sebesar 4,29 dari skala 5, yang berarti responden cenderung memiliki persepsi positif terhadap SIPD. Seluruh item instrumen valid dengan *Nilai Corrected Item-Total Correlation* antara 0,55 dan 0,80, dan instrumen memiliki konsistensi internal yang tinggi dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,91.

Penerapan SIPD masih menghadapi beberapa kendala, yaitu ketergantungan terhadap koneksi internet, kebutuhan ketelitian dalam pengelolaan data, penyesuaian terhadap pembaruan sistem, dan kompleksitas alur penatausahaan keuangan. Kesimpulan penelitian ini terbatas pada persepsi responden.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pengarahan atau pelatihan secara berkala perlu dilakukan, terutama ketika terdapat perubahan menu, fitur, atau alur SIPD. Pengguna diharapkan melakukan pengecekan ulang data sebelum diproses lebih lanjut, dan kestabilan koneksi internet perlu diperhatikan karena SIPD merupakan sistem berbasis web. BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dapat terus mengevaluasi penggunaan SIPD dari aspek manfaat dan kemudahan penggunaan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak responden dan variabel TAM lainnya, serta menguji hubungan antarkonstruk dan perbandingan antarkelompok pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114. https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019

[2] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020

[3] Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

[4] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

[5] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186–204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926

[6] Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

[7] Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (Archives of Psychology, No. 140). Columbia University.
[8] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). https://sipd.kemendagri.go.id/
[9] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). https://sipd-ri.kemendagri.go.id/